

Dimensi Kemiskinan dan Tantangan bagi Para Akademisi dan Pengambil Kebijakan

Uzair Suhaimi

uzairsuhaimi.wordpress.com

Kemiskinan merupakan keprihatinan global, nasional, dan regional. Hal ini terungkap dalam dokumen-dokumen MDGs, target RJPM dan renstrada pemda propinsi maupun kabupaten/kota. Semua dokumen itu mengekspresikan kehendak bersama untuk menurunkan angka kemiskinan. Tetapi apa kriteria yang perlu digunakan untuk menentukan kemiskinan?

Di Indonesia penghitungan angka kemiskinan yang resmi menggunakan hanya satu kriteria atau satu variabel yaitu pengeluaran (sebagai pendekatan untuk pendapatan) sebagaimana yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Seseorang dikategorikan miskin jika nilai pengeluarannya lebih kecil dari batas nilai tertentu (*threshold*) yang dikenal sebagai garis kemiskinan (*poverty line*).

Banyak yang menilai definisi operasional itu terlalu sederhana dan penilaian semacam itu beralasan (*justified*) mengingat luasnya dimensi kemiskinan. Bahwa kemiskinan menggambarkan kekurangan pendapatan atau daya beli- sebagai dampak dari kekurangan aksesibilitas dan atau kepemilikan modal ekonomi- jelas dan tak-terbantahkan. Tetapi juga tak-terbantahkan bahwa kemiskinan juga merefleksikan kekurangan berbagai modal lainnya termasuk modal sosial, modal manusia dan modal politik.

- Modal sosial, termasuk jejaring sosial yang memampukan mengakses sumberdaya ekonomi dan sumberdaya lainnya
- Modal manusia, termasuk tingkat terdidik yang memampukan mengakses informasi mengenai peluang-

peluang ekonomi dan kemudahan-kemudahan publik

- Modal politik, termasuk jejaring kekuasaan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan.

Singkatnya, kemiskinan berdimensi sangat luas. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya para akademisi dan pengambil kebijakan. Tantangan bagi para akademisi adalah menjawab paling tidak tiga pertanyaan besar berikut.

(1) Bagaimana mengukur kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria sehingga ukuran yang dihasilkan memotret wajah kemiskinan secara utuh?

Ilustrasi berikut menunjukkan pertanyaan ini relevan. Untuk memahami gambaran yang agak utuh mengenai suatu benda fisik kita tidak akan pernah mampu menggunakan hanya satu ukuran. Untuk memperoleh gambaran agak lengkap mengenai sepotong balok dalam suatu ruangan, misalnya, kita perlu memperoleh ukuran mengenai panjang, lebar, tinggi balok itu, posisi atau koordinat balok itu dalam ruangan, dan massa dari materi dasar balok itu. Dengan cara pandang semacam ini maka akan tampak ‘naif’ jika kita mengukur ‘kemiskinan’ (yang jelas lebih abstrak dibandingkan balok) dengan menggunakan hanya satu ukuran yaitu pengeluaran. Dalam hal ini berharga untuk dipelajari karya Verma (1999)[i] yang menjelaskan perbedaan antara kemiskinan latent (*latent poverty*) dan kemiskinan manifes (*manifest poverty*)[ii].

(2) Bagaimana mengenali faktor-faktor mendasar (*underlying factors*) kemiskinan yang mengambarkan dimensi-dimensi ekonomi tetapi juga dimensi-dimensi non-ekonomi?

Identifikasi mengenai faktor-faktor ini akan sangat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang realistik.

(3) Bagaimana mengukur dinamika kemiskinan- dengan cara membedakan antara kemiskinan persisten (*persistent poverty*) dengan kemiskinan trasien (*transient poverty*)- secara berkala?

Dari sisi kebijakan memberdayakan jenis kemiskinan itu relevan karena masing-masing menuntut strategi penanggulangan yang berbeda. Untuk menanggulangi kemiskinan kronis strategi kebijakan yang masuk akal adalah kebijakan jangka panjang yang konsisten; sementara untuk mengatasi kemiskinan transien strategi yang sesuai adalah kebijakan jangka pendek atau bahkan *adhoc*. Bentuk kebijakan terakhir ini dapat bermacam-macam termasuk subsidi terbatas bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap suatu kebijakan tertentu.

Tantangan bagi pengambil kebijakan tidak kurang. Mereka dituntut memiliki kemampuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan memonitor kebijakan penanggulangan kemiskinan yang 'cerdas' dengan pendekatan multidimesi, satu-satunya pendekatan yang sesuai dengan luasnya dimensi kemiskinan. Sebagai catatan, mengingat miskinnya 'modal' yang dimiliki penduduk miskin maka kebijakan yang berpihak kepada mereka (*pro-poor policies*) bukan merupakan pilihan tetapi keharusan.

[i] Verma, Vijay K. ' *Measuring the degree of poverty in a dynamic and comparative context*' (1999), makalah yang disajikan dalam *the Sixth Islamic Countries Conference on Statistical Sciences*, Lahore (Pakistan), 27-31 August 1999.

[ii] Verma mendefinisikan kemiskinan laten sebagai *income poverty atau supplementary poverty*; kemiskinan manifes sebagai *income poverty dan supplementary poverty*. *Income poverty* didasarkan pada variabel pendapatan tetapi setelah direlatifkan dengan terori himpunan fuzy (*fuzzy set*). *Supplementary poverty* didasarkan pada indikator-indikator tarap hidup rumah tangga dan anggotanya setelah dikompositkan.